



Radar Jogja

Dalam 19 Hari Tutup Tujuh Titik TPS Ilegal

Pemkot Jogja Dirikan Posko, Sampah Liar Menurun

BANTUL - Satpol PP Bantul kembali menutup satu titik pembuangan sampah (TPS) ilegal di Kalurahan Bantul. Total sepanjang Maret saja sudah ada tujuh TPS ilegal yang ditutup. Setelah enam titik sebelumnya di Kapanewon Banguntapan dan Jetis ditutup.

Kepala Satpol PP Bantul Jati Bayu Broto mengatakan, penutupan ini karena keberadaan TPS tersebut tidak berizin dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul. Selain itu, adanya laporan masyarakat karena terganggu sehingga dilakukan penindakan ditutup. "Nanti ketika kembali dibuka akan kami yustisikan," katanya, Rabu (19/3).

Terbaru ditutup di Padukuhan Kaligawe, Kalurahan Bantul, Senin (17/3) lalu. Lokasinya di lahan milik pribadi warga yang dikelola bersama sejumlah karyawan lainnya. Menurutnya, masalah pembinaan ada di DLH Bantul Satpol PP hanya melakukan penindakan penutupan saja. "Kalau pelanggaran sulit dibina nanti masuk Pol PP untuk ditindak seperti di Kaligawe," sambungnya.

TPS ilegal di Kaligawe ini terdapat cerobong asap untuk pembakaran sampah. Jati menyebut, itu menjadi titik simpul protes warga karena asapnya termasuk juga bau sampahnya. Pasalnya, bakar sam-



PELANGGARAN: TPS ilegal di Kaligawe, Bantul yang ditutup Satpol Bantul ini menjadi titik yang ketujuh selama Maret.

pahnya hampir setiap hari. "Informasi yang kami dapat truk-truk sampah swasta ada yang dari kota tidak sampah sekitar," tuturnya.

Operasionalnya diperkirakan sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Utamanya imbas penutupan TPA Piyungan. Jati menegaskan, tujuh titik yang ditutup akan dilakukan pengawasan agar tidak beroperasi dan tidak menerima sampah lagi. Dia mengungkapkan, terbaru ada yang akan ditindak lagi hari ini. Namun, belum dapat disampaikannya karena masih dalam pembinaan DLH. Ketika DLH sudah tidak mampu membina baru akan dilakukan penindakan. Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Bantul Sri Hartati menegaskan, akan selalu men-

indak laporan TPS ilegal. Menurutnya, dari tujuh penindakan selama Maret ini itu bersumber dari laporan warga atau rekomendasi DLH Bantul. "Setiap laporan pasti kami tindak lanjut ketika bukti cukup dilakukan penindakan," tandasnya.



RERESIK SAMPAH

Di Kota Jogja, program pengawasan depo dan titik sampah liar dengan posko diklaim mampu mencegah timbul sampah liar. Bahkan penurunannya dapat menyentuh 30 persen dibanding sebelum dijaga.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, wujud pengawasan depo dan titik sampah liar itu dilakukan dengan melibatkan petugas Satpol PP dan linmas. Tiap titik posko memiliki peran untuk menjaga dan menghalau masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat

atau waktunya.

Dia pun mencontohkan sejumlah titik sampah liar yang kini sudah tidak lagi digunakan untuk pembuangan. Misalnya seperti di Kalimambu yang berada di Jalan Veteran dan di depan Gembiraloka atau Jalan Kusumanegara yang sudah bersih dari sampah. Kemudian juga di Pasar Demangan menurutnya juga tidak ada lagi sampah menggunung. "Tapi itu saya hitung baru sekitar 30 persen-35 persenlah dari sampah liar yang ada di jalan-jalan lain," ujar Hasto, Rabu (19/3).

Guna mengantisipasi terus timbulnya sampah liar, mantan Bupati Kulonprogo itu setiap Selasa sore akan minta laporan. "Laporan dipresentasikan berapa ton, titik mana saja, tonasenya berapa, terus sisanya mana, dan sisanya titik mana saja," tegasnya. (inu/rul/pr/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005